

**IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DESA KUALA BANGKA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

MAR'IE MUHAMMAD TANJUNG
NPM.1503090003

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

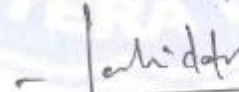
Nama Mahasiswa : **MAR'IE MUHAMMAD TANJUNG**
N P M : 1503090003
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA KUALA BANGKA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

Medan, 08 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH:
KETUA JURUSAN,


MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

DEKAN,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **MAR'IE MUHAMMAD TANJUNG**
N P M : 1503090003
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Azamris Chanra, M.AP (.....)
PENGUJI II : Dra. Yurisna Tanjung, M.AP (.....)
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

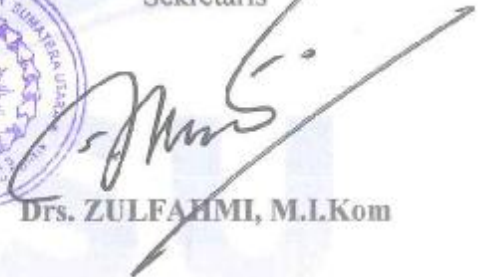
Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.LKom

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya MAR'IE MUHAMMAD TANJUNG, NPM 1503090003, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 Maret 2019

Yang menyatakan



MAR'IE MUHAMMAD TANJUNG



Unggul, Cerdas dan Terpercaya
 Untuk menjawab surat ini agar disebutkan
 nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mucitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **MAR'IE MUHAMMAD TANJUNG**
 N P M : **1503090003**
 Jurusan : **ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**
 Judul Skripsi : **Implementasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	10/12/2018	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi	
2	12/12/2018	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi	
3	15/12/2018	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi	
4	17/12/2018	Bimbingan dan Perbaiki Bab II	
5	20/12/2018	Bimbingan dan Perbaiki Bab III	
6	23/12/2018	Bimbingan dan Acc Seminar Proposal	
7	28/01/2019	Bimbingan Bab III & IV	
8	01/02/2019	Bimbingan Bab IV Hasil Penelaah	
9	03/02/19	Perbaikan Abstrak dan Kesimpulan	
10	03/02/19	Acc Mapa Harap	

Medan, 03... FEBRUARI.....20.19..

Dekan,

(DR. ARIFIN SHALEH)

Ketua Program Studi,

(H. MUHAMMAD HIDDIN, SSOS)

Pembimbing ke : I.

(DR. ARIFIN SHALEH, SSOS, M. SP)

**IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA KUALA BANGKA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

ABSTRAK

**MAR`IE MUHAMMAD TANJUNG
1503090003**

Pembangunan Desa perlu menjadikan prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa. Melihat permasalahan itu, lahir Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum tata Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Pemberdayaan masyarakat dan program-program pembangunan desa. Masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk diatasi apalagi dihilangkan, sebaliknya, kemiskinan setiap tahunnya semakin meningkat ditambah lagi kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dengan kondisi tersebut. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dengan adanya UU sekaligus merupakan penegasan bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa visi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan dari Implementasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam Moleong, (2013 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah dijalankan sesuai dengan prosedur. Hal ini dibuktikan bahwa dengan terealisasi pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan di Desa Kuala Bangka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengertian Dana Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil`alamin, Puji Syukur diucapkan kehadiran Allah Subhanallah wata`al atas Berkah Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan syalawat tercurah kepada Nabi Muhammad Shallahu alaihi wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. skripsi adalah syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi ini berisi Implementasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini telah dilewati sebagai suatu tantangan yang seharusnya dijalani, disamping sebagai pemenuhan kewajiban yang semestinya dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, yang istimewa kepada kedua orang tua peneliti Ayah Mahmud Tanjung dan Ibu Siti Malwani tersayang yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada peneliti berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap peneliti, sehingga peneliti termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi. Tercinta Abang dan kakak peneliti Fazar siddik Tanjung dan Mahnila Wati Tanjung, keluarga yang selalu perhatian dan mendukung kegiatan peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, mendidik, mendukung. Memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Drs. Yurisna Tanjung, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak-Ibu Dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan masukan kepada Penulis.
7. Semua keluarga dan narasumber yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.
8. Kepada Kepala Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memberikan izin kepada Penulis sehingga memudahkan dalam pembuatan skripsi.

9. Kepada teman-teman seperjuanganku Yoga Prawira dan Rian Hidayat serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menemani Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019
Hormat Saya

MAR'IE MUHAMMAD TANJUNG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	IV
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 Implementasi.....	8
2.1.1 Definisi Implementasi.....	8
2.1.2 Implementasi Kebijakan	9
2.1.3 Hakikat Implementasi Kebijakan	9
2.1.4 Analisis Pola Implementasi Kebijakan.....	10
2.1.5 Pendekatan Implementasi	11
2.2 Pengertian Desa	12
2.2.1 Pengertian Dana Desa.....	13
2.2.2 Pengalokasian Dana Desa.....	13
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	17
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.3.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	18
2.3.4 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2.3.5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.4 Pengertian Partisipasi.....	24
2.4.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	24
2.5 Anggapan Dasar.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Kerangka Konsep.....	28
3.3 Definisi Konsep	29
3.4 Kategorisasi Penelitian	29
3.5 Informan dan Narasumber	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data	31
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	33
3.9 Keadaan Penduduk	33
3.10 Letak dan Luas Wilayah	33
3.11 Tofografi dan Jenis Tanah	34
3.12 Visi dan Misi Desa Kuala Bangka.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.2 Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategorisasi Penelitian	30
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin	37
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konsep	28
Gambar 1.1 Teknik Analisis Data	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa perlu menjadikan prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa permasalahan desa antara lain : Pertama, desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program-program pembangunan dan pemberdayaan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. Kemudian yang kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat jauh dari kata cukup untuk menghadapi keluarganya. (Bambang Hidayana dalam Jusman 2016).

Masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk diatasi apalagi ingin dihilangkan. Malah sebaliknya, kemiskinan setiap tahunnya semakin meningkat ditambah lagi kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dengan kondisi tersebut. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan

juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa itu, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan atau pemberdayaan telah dibuat serta di implementasikan didesa untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Salah satunya kebijakan melakukan pemberdayaan ekonomi dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten-Kota tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai.

ADD yang ada selanjutnya dikelola oleh pemerintahan desa dengan ketentuan penggunaan sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian diatur lebih detail dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 yang

menjelaskan mengenai tujuan ADD, Tata cara penghitungan besaran anggaran per desa, Mekanisme penyaluran, Penggunaan dana desa sampai dengan pertanggung jawabannya. Selanjutnya dengan diterapkan UU Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat melalui PP No.43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang juga mengatur mekanisme pelaksanaan ADD dan pengalokasiannya.

Melalui Alokasi ADD, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan dan pemberdayaan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola pengolahan yang baik, pola tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program pemerintah dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat desa ke arah yang positif serta kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu desa yang memperoleh ADD adalah Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa ini memperoleh ADD sejak tahun 2014 dan dananya digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat dan pembangunan jalan. Pemberian Dana Desa sangat membantu masyarakat apalagi saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang

sulit karena harga buah sawit tidak stabil. Mata pencaharian masyarakat Desa Kuala Bangka bergantung kepada buah kelapa sawit. Disebabkan turunnya harga buah sawit membuat masyarakat dan yang bekerja sebagai buruh hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi keluarga. Sebagian mereka pun bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan dalih bekerja sampingan agar dapat memenuhi kehidupan. Dengan bekerja sebagai nelayan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka yang mana hasil tangkapan ikan nanti dipasarkan ke pekan di setiap hari rabu. Diharapkan pihak pemerintahan desa dapat melaksanakan implementasi dana desa dengan baik yang mana nantinya dapat membuat masyarakat lebih sejahtera dengan mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Desa Kuala Bangka memiliki 12 dusun dengan jumlah laki-laki mencapai 3.304 jiwa sedangkan perempuan 3.199 jiwa dengan keseluruhan penduduk Desa Kuala Bangka mencapai 6.503 jiwa dengan luas wilayah 11.120 km persegi. (Kepala Desa Kuala Bangka : 2018)

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, Salah satunya untuk kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil dan Menengah, memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM (Usaha Kecil Menengah) mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM

(Usaha Kecil Menengah) dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu UKM (Usaha Kecil Menengah) di Desa Kuala Bangka terciptanya perekonomian yang kokoh adalah faktor modal. Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih di usahkan pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah di sebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Dengan demikian permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan UKM (Usaha Kecil Menengah) dalam rangka menguatkan ekonomi nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) masih mengalami kesulitan dalam memperkuat kredit tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan **judul "Implementasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni : bagaimana implementasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Desa Kuala Bangka dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Desa, Pengertian Dana Desa, Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, Tujuan Pemberdayaan Masyarakat, Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat , Strategi Pemberdayaan, Indikator Pemberdayaan Masyarakat, Pengertian Partisipasi, Pengertian Sumber Daya Manusia, Pengertian Ekonomi Masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informan dan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menerangkan kesimpulan dan saran. Sedaangkan dalam akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran lampiran.

BAB II

URAIAN TEOROTIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Definisi Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Anggara, 2014:232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:232), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Nurdin (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Nugroho (2004:163) implementasi menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-acting-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerpa, Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakn dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Edward dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pda akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasran kebijakan itu sendiri.

2.1.3 Hakikat Implementasi Kebijakan.

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmain dalam Agustino (2016:128) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

2.1.4 Analisis Pola Implementasi Kebijakan

Ada dua konsep dasar berkenaan dengan implementasi kebijakan. Pertama, konsep tentang perlatan kebijakan (*policy instrument*). Perlatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang di ingin dicapai. Kedua, konsep tentang kewenangan yang tersedia untuk melaksanakan implementasi. Kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakaan. Kewenangan berkaitan dengan posisi organisasi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Disamping kedua konsep tersebut, dilapangan kita menjumpai beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai faktor teknis, faktor administratif,dan hubungan kerja antar organisasi atau antar instansi dalam Abidin (2012:154).

Faktor teknis itu antara berkenaan dengan:

1. Kondisi teknis dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah kimia pabrik.
2. Intensitas tingkat keparahan permasalahan, yang menunjukkan tingkat bahaya atau risiko yang ditimbulkan oleh suatu masalah, apakah suatu masalah masih berada dibawah ambang batas atau sudah melampauinya.
3. Tingkat penguasaan teknologi yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut .

Faktor administratif meliputi aspek-aspek dari hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut, antara lain :

1. Status Kebijakan.
2. Peralatan Kebijakan.
3. Sistem administrasi dan lingkungan kerja yang ada.
4. Jangka waktu yang ditentukan dan yang diperlukan.

Sementara itu, hubungan kerja antar instansi yang terkait, antara lain mencakup:

1. Kepentingan dari pihak-pihak yang terkait.
2. Peran dan kekuasaan yang ada pada masing-masing instansi.
3. Teknik komunikasi yang dipakai.

2.1.5 Pendekatan Implementasi

Menurut Abidin (2012:155) proses implementasi pada umumnya mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas kebawah. Apa yang di implementasikan adalah apa yang telah di putuskan. Namun dalam masyarakat yang demokratis, seperti yang telah di ungkapkan peranan rakyat sebagai pemilik Negara selalu harus diindahkan. Sehubungan dengan kecendrungan dari implementasi yang bersifat sentralitis dan prinsip demokrasi, implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sebagai sesuatu yang menentukan. Oleh sebab itu, proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama dengan proses penataan institusi.

2. Pendekatan prosedural dan manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis. Implementasi tidak lain dari pada langkah-langkah yang biasa dikenal dalam konsep planning, evaluation, dan review technique (PERT). Sesuai dengan pengertian prosedural, yang penting dalam proses implementasi adalah tata urutan, baik dalam pengertian prioritas berdasarkan signifikan maupun prioritas menurut waktu.

3. Pendekatan Kejiwaan.

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengaruh faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sering kali sangat penting, bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam kebijakan.

4. Pendekatan Politik.

Dilihat dari pandangan ini, implementasi kebijakan tidak dilepaskan dari politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antar kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antar instansi, yang dapat disebut sebagai politik dalam birokrasi. Persoalannya disini menyangkut kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi. Menurut Hogwood and Gunn, keberhasilan keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. (Howgood Gunn dalam Abidin 2012: 157).

2.2 Pengertian Desa

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Makawimbang (2016:110-111) dalam Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi khusus.

2.2.2 Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Pemerintah daerah Kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD

kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dibagikan secara proporsional ke setiap desa.

Perhitungan besar anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk di teruskan ke rekening desa juga diatur dalam (PP No.72 Tahun 2005) dengan formula berikut :

$$\boxed{\text{ADD} = 10\% \times \text{DBH Pajak dan Retribusi} + \text{DAU} - \text{Belanja Pegawai}}$$

Pengaturan mengenai ADD dalam PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detail lagi dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran perdesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai pertanggung jawabannya.

Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007, yaitu:

1. ADD bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya.

4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70 untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Diperlukan pelaporan setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala(bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi kabupaten/kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai dengan tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBDes dan diluar untuk anggaran ADD.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat. Melalui PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya. Secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan dikeluarkan PP No. 43 Tahun 2014 ini, kecuali untuk penetapan formula.

Dalam penetapan formula terdapat perubahan yang signifikan terutama dalam penetapan besaran anggaran yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan ke rekening desa. Jika dulu adalah pengurangannya belanja pegawai, dengan diberlakukannya PP No.43 Tahun 2014 ini pengurangannya adalah Dana alokasi Khusus (DAK). Pada mayoritas pemerintah daerah, proporsi belanja pegawai dalam APBD merupakan proporsi yang dominan, sehingga tentunya akan

memberatkan bagi pemerintah daerah jika harus menyalurkan ADD ke Desa sesuai dengan formula dalam PP No. 43 Tahun 2014, berikut:

$$\text{ADD} = 10\% \times \text{BDH Pajak dan Retribusi} + \text{DAU} - \text{DAK}$$

Pembagian alokasi dana desa dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana yang sama untuk disetiap desa atau yang disebut Alokasi Dana Desa Minimal. Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen tambahan sebesar 30%.
2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk disetiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional. Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan dasar umum antar desa dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di desa. Sedangkan variabel independen tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan jumlah unit komunitas (dusun).

Melalui Alokasi ADD diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa

itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan. Kebijakan ADD yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan diharapkan juga mampu mendorong penanganan yang dihadapi masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu dalangnya program-program dari pemerintah kabupaten/kota.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian berdaya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut di terjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi daya, bukan kekuasaan dari pada pemberdayaan itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah pemberian *energize* atau katakan memberi energi pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. (Ambar Teguh 2004).

2.3.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi beragam. Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Mardikanto (2017:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar pemberdayaan dimasa-masa mendatang.
3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan peristiwa yang lain. Misalnya dengan melihat cangkul orang diinginkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik, melihat tanaman yang kerdil/subur akan meningkatnya kepada usaha-usaha pemupukan.

2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi layak, kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehata, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural kebijakan dan kultural. (Sunyoto Usman, 2004).

2.3.4 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan sebagai suatu gaya yang harus menentukan diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (*the style of action within a system*). Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nagel dalam Mardikanto (2017:159) mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yang akan diterapkan harus memperhatikan:

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan
2. Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan
3. Pengembangan sumberdaya manusia/fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan.

4. Alternatif organisasi pemberdayaanyang akan diterapkan yang berhadapan dengan pilihan-pilihan antara:
 - a. Publik ataukah swasta
 - b. Pemerintah ataukah non-pemerintah
 - c. Dari atas (birokratis) ataukah dari bawah (partisipatif)
 - d. Mencari keuntungan ataukah non-profit.
 - e. Kariatif ataukah mengembalikan biaya.
 - f. Umum ataukah sektoral.
 - g. Mulai-tujuan atukah tujuan tunggal.
 - h. Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan.

Terkait dengan hal itu, pelaksanaan proses dan tujuan yang dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun demikian tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam artian mengaitkan klien (penerima manfaat) dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya, oleh karenanya dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Mikro.
2. Pendekatan Mezzo.
3. Pendekatan Makro.

Dipihak lain, pendekatan pemberdayaan dapat pual diinformasikan dengan mengacu kepada landasan fiosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan yang mencakup:
 - a. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat bukan untuk mencapai tujuan orang luar atau penguasa.
 - b. Pilihan kegiatan, metoda maupun tehnik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat.
 - c. Ukuran keberhasilan pemberdayaan, bukanlah ukuran yang dibawa oleh fasilitator atau berasal dari luar tetapi berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaat.
2. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa apapun kegiatan yang akan dilakukan, darimanapun sumberdaya dan teknologi yang akan digunakan dan siapapun yang akan dilibatkan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat.
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu menyaipkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.5 Strategi Pemberdayaan masyarakat.

Ismawan dalam Mardikanto (2017:170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri :

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pengembangan kelembagaan kelompok
3. Pemupukan modal masyarakat
4. Pengembangan usaha produktif
5. Penyediaan informasi tepat-guna
6. Indikator pemberdayaan masyarakat.

Agar para fasilitator mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika pendampingan sosial diberikan segenap upaya dapatdikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima mnafaat perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan Girvan dalam Mardikanto, (2017: 289) yakni :

1. Kebebasan mobilitas :

Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti kepasar, fasilitas medis, rumah ibadah, dan lain-lain.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil:

Kemampuan individu membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut,

sabun mandi). Individu di anggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas besar:

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier seperti lemari, tv, dll.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga:

Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan keluarga.

5. Kesadaran hukum dan politik:

Mengetahui salah satu nama pegawai pemerintahan desa/ kelurahan.

6. Keterlibatan dalam kampanye dan protes:

Seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.

7. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga:

Memiliki rumah, aset produktif, tabungan.

Lebih lanjut, Mardikanto, (2003) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup:

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan
2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.

4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk pelancaran pelaksanaan program pengendalian.
5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
7. Meningkatkan kapasitas skala apartisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
8. Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan.
9. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.

2.4 Pengertian Partisipasi.

Pengertian secara umum dapat ditangkap dari istilah dari partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Menurut Sumaryadi (2010 : 46) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi,serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2.4.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengertian secara umum dapat diartikan ekonomi masyarakat yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat

sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian ini adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan terciptakejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

Menurut Deliarnov (2009) konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian “pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) pemebangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat.

2.5 Anggapan Dasar

Anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal yang digunakan untuk tempat berpijak bagi peneliti di dalam melaksanakan penelitiannya dalam pembuatan anggapan dasar

yang harus diperhatikan adalah membaca buku, mendengarkan berita, berkunjung ke tempat obyek penelitian, dan mengadakan abstraksi. Serta manfaat dalam pembuatan anggapan dasar adalah ada pijakan berfikir yang kokoh, untuk mempertegas variable dan berguna menentukan dan merumuskan hipotesis. Adapun anggapan dasar dalam penelitian adalah dana desa sangat berperan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

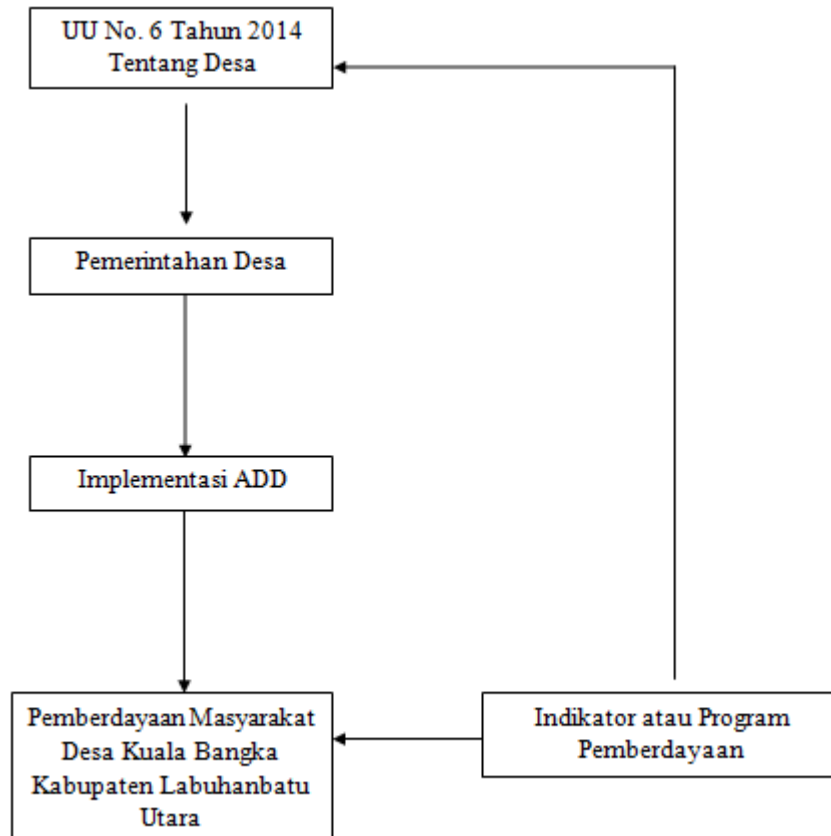
Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam Moleong (2013:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jadi jelas definisi memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 1.1



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif .
2. Implementasi Kebijakan berarti menyediakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu .
3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang ditansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat .
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya yang dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat berdaya dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya serta mampu berfungsi secara sosial.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu. kategorisasi dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel kategorisasi di bawah ini:

Tabel 1.1 Kategorisasi Penelitian

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Implementasi Anggaran Dana Desa	- Tujuan dan sasaran - Program kegiatan - Pelaksanaan - Pendapatan anggaran dana desa
2.	Pemberdayaan Masyarakat	- UMKM - Pemanfaatan lahan - Berkelanjutan

Sumber : Hasil Olahan, 2018

3.5 Informan atau Narasumber

Adapun narasumber pada penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari: 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kepala Urusan Kesejahteraan rakyat, dan 4 Orang Masyarakat Desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
 - a. Metode wawancara (Interview), yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung inform informasi atau keterangan yang disampaikan informan.

b. Metode observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dilapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

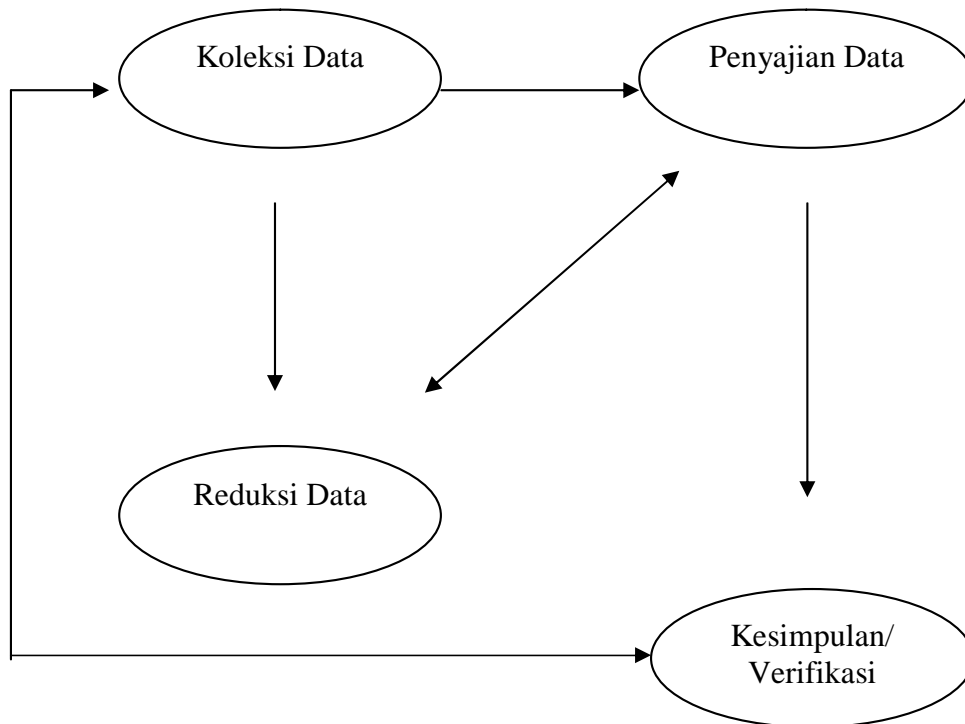
Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi kepustakaan .

3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Jalur analisis data bisa dilihat seperti gambar berikut ini :



Gambar 1.1 Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019. Penelitian ini akan dilakukan di kantor Kepala Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa tersebut tidak jauh dari pusat kota Aek Kanopan yakni hanya kurang lebih tiga jam waktu tempuh.

3.9 Keadaan Penduduk

Penduduk asli Desa Kuala Bangka adalah etnis Melayu, yang hingga saat ini mayoritas etnis ini menjadi salah satu mayoritas namun seiring berkembangnya Desa Kuala Bangka maka hadir etnis lain seperti Jawa, dan Batak dan lain lain. Mayoritas penduduk di sini bermata pencaharian sebagai Petani, dan nelayan. Keadaan fasilitas yang kurang memadai saat itu seperti jalan yang belum memadai, sarana dan prasarana pendidikan yang masih tergolong rendah. Sehingga menyebabkan anak di Desa Kuala Bangka memutuskan untuk tidak bersekolah melainkan menjadi petani ataupun wiraswasta seperti orang tuanya.

3.10 Letak dan Luas Wilayah

Desa Kuala Bangka masuk dalam wilayah Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berjarak kurang lebih 12 km dari kantor Camat Kualuh Hilir dan terdiri dari 12 Dusun yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Leidong
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Mesjid
- d. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Sentang

Jarak antara Ibukota Desa dengan Ibukota Kecamatan Kualuh Hilir kurang lebih 12 km, dapat ditempuh melalui jalan darat dengan berbagai jenis kendaraan. Desa Kuala Bangka berada diatas permukiman laut terletak dijalan lalu lintas Desa Kuala Bangka dengan Desa Kelurahan Kampung Mesjid.

3.11 Tofografi dan Jenis Tanah

Tanah di Desa Kuala Bangka merupakan tanah campuran antara tanah liat dan tanah gambut berada di Dusun Kampung Jawa, dan juga iklim di desa Kuala Bangka pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab, intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebl. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan September sampai Desember, berkisar di antara 2355-2366 mm setiap tahun sdangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Januari sampai Agustus. Suhu udara rata-rata 30 derajat Celsius, suhu udara terendah 27 derajat dan tertinggi dengan kelembaban udara 40%-100%.

3.12 Visi dan Misi Desa Kuala Bangka

1. Visi Desa Kuala Bangka

Melayani Masyarakat Desa Kuala Bangka untuk mewujudkan warga yang sehat pintar, dan sejahtera. Visi pembangunan Desa Kuala Bangka tersebut mengandung makna, bahwa pemerintah Desa bersama Masyarkat berkeinginan

lima tahun ke depan kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun bathin.

Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintah yang baik (demokratis ,transparan dan berkepedulian. Selain itu, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas (sehat, cerdas, dan produktif). Tidak kalah pentingnya dari semua itu, pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

Desa Kuala Bangka mempunyai Visi “Kuala Bangka desa Bersemi’ yang berarti bersih artinya lingkungannya, bersih aparatnya dari KKM, bersih masyarakat nya dari pelanggaran hukum, dan sejahtera yang artinya segala kebutuhan hidup warga dapat terpenuhi, segala kepentingan warga dapat terlayani, serta mandiri yang artinya mampu sendiri, tidak tergantung kepada bantuan pihak lain.

2. Misi Desa Kuala Bangka

- a. Melaksanakan tugas pemerintah secara transparan.
- b. .Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih.
- c. Memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba.
- d. Meningkatkan pendapatan warga masyarakat,
- e. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- f. Melestarikan tradisi gotong royong.
- g. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap pembangunan.

- h. Membiasakan masyarakat untuk menanggulangi segala keperluan dan kebutuhannya sendiri.
- i. Meningkatkan dana pemerintahan secara efektif dan efisien.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi (%)
1.	Laki-laki	5	80 %
2.	Perempuan	2	20 %
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data observasi penelitian tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 yang tercermin di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau persentase 80 %, sedangkan sisanya berasal dari jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 2 orang atau persentase 10 %.

4.1.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu, tingkat SD, SMP, SMA dan Sarjana. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kaategori tersebut.

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	0	0
2.	SMP	0	0
3.	SMA	2	20%
4.	SARJANA	5	80%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data observasi penelitian Tahun 2019

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 5 orang dengan persentase 80% sedangkan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 orang dengan persentase 10%.

4.1.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari jabatan atau pekerjaannya, narasumber dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu, Pejabat Kantor Desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Petani, dan Wiraswasta. Pada 4.3 ini, kita akan melihat persentase masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki oleh narasumber.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase%
1.	Pejabat Kantor Desa	3	60%
2.	PNS	2	20%
3.	Petani	1	10%
4.	Wiraswasta	1	10%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data observasi penelitian Tahun 2019

Berdasarkan dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas dalam penyebaran wacana kepada narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Sertifikasi Pemerintahan dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60%, tingkat pekerjaan sebagai PNS yakni 2 orang atau 20% sedangkan sebagai petani sebanyak 1 orang atau persentase 10% dan sebagai wiraswasta sebanyak 1 orang dengan frekuensi 10%.

4.1.4 Implementasi Anggaran Dana Desa

1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dengan Bapak Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka, bahwa tujuan dari anggaran Dana Desa yakni untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Desa Kuala Bangka seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, pembuatan parit beton, pembangunan kantor, dan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga tujuan dari anggaran dari Dana Desa untuk mengurangi keluarga miskin yang ada di Desa Kuala Bangka.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs. Atan Tanjung selaku Sekretaris Desa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, Tujuan Dari anggaran Dana Desa yakni untuk program-program pembangunan Desa dan juga Pemberdayaan Masyarakat. Artinya Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan juga pemberdayaan demi kemajuan Desa Kuala Bnagka. Dalam hal ini fokus Pemerintah Desa Kuala Bangka menggunakan Dana ini untuk program Pembangunan Desa baik infrastruktur maupun pembangunan Sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dengan Bapak Ihyaul Wathon S,Sos selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, tujuan dari anggaran Dana Desa antara lain untuk memperbaiki sarana dan prasarana Desa seperti

Pembangunan jalan, jembatan, rehab sekolah dan juga untuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh pada wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dengan Bapak Sofyan Pasaribu selaku tokoh pemuda di Desa Kuala Bangka bahwa masyarakat mengetahui adanya program alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan juga pemberdayaan. Sepengetahuan beliau tujuan dari anggaran Dana Desa tersebut untuk pembangunan Desa seperti pembangunan, jalan, jembatan saluran irigasi pertanian dan juga program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kemudian menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dengan ibu Sundari Juwita selaku masyarakat Desa Kuala Bangka bahwa beliau mengatakan tujuan anggaran Dana Desa setahu beliau digunakan untuk program-program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Kepada Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019 bertempat di Kantor Desa Kuala Bangka, bahwa sasaran dari anggaran Dana Desa adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sumber dana nya berasal dari alokasi Dana Desa atau APBD Kabupaten/Kota Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Drs. Atan Tanjung selaku sekretaris Desa Kuala Bangka Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 bahwa sasaran dari anggaran Dana Desa digunakan untuk bidang

pembangunan sarana dan prasarana Desa meliputi pembangunan jalan Desa, pembangunan parit beton, rehab bangunan kelas dan kantor dan juga untuk bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Bapak Ihyaul Wathon Tanjung selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Kamis 7 Februari 2019 bahwa sasaran dari anggaran Dana Desa baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sofyan Pasaribu selaku tokoh pemuda di desa Kuala Bangka pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, bahwa sasaran anggaran dana desa yang beliau ketahui adalah untuk meningkatkan akses layanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sundari Juwita selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019, bahwa sasaran dari anggaran dana desa tersebut untuk pembangunan dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Program Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019, bahwa program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka dari alokasi dana desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti

jalan, jembatan, pembangunan dan rehab gedung PAUD, pembuatan parit beton, dan juga ada program untuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan pendidikan pelatihan kepala desa dan perangkat desa, kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok pemuda, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan. Setelah itu, ada program unggulan yang saat ini menjadi prioritas desa antara lain pemasangan jaringan internet kemasyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Drs Atan Tanjung selaku Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019, beliau mengatakan adapun program-program yang telah ditawarkan oleh pemerintah desa Kuala Bangka kepada masyarakat yakni program-program yang telah ditawarkan oleh pemerintah Desa Kuala Bangka kepada masyarakat yakni program pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan juga program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta ada program unggulan desa saat ini yang sedang dikerjakan oleh pelaksana pemasangan jaringan internet di desa Kuala Bangka dengan tujuan agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ihyaul Wathon S,Sos. selaku kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Pada hari Kamis 7 Februari 2019. Beliau mengatakan bahwa program-program yang telah ditawarkan oleh pemerintah Desa yang berasal dari anggaran dana desa yakni

program-program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat seperti kegiatan kapasitas masyarakat kelompok petani dengan memberikan pengadaan berupa hewa ternak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sofyan Pasaribu selaku tokoh pemuda masyarakat di desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019, disini beliau mempunyai keinginan mengenai alokasi dana desa seharusnya digunakan untuk program-program yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti pengadaan lapangan olahraga dan program yang mendukung UKM masyarakat desa yang tujuannya untuk memberi aktivitas positif terhadap masyarakat atau pemuda agar terhindar dari hal-hal negatif seperti narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sundari Juwita selaku masyarakat desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019, bahwa ada program-program yang telah ditawarkan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat tetapi program tersebut hanya bersifat pembangunan saja, sementara kami masyarakat butuh untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan keluarga.

3. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019. Beliau mengatakan bahwa Implementasi Dana Desa melalui musyawarah desa dan dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat untuk menampung tenaga kerja yang bersifat padat karya, dan sangat mengutamakan peran dan keikutsertaan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan juga pemerintahan

Desa Kuala Bangka melakukan pelaksanaan Implementasi Dana Desa dan tujuannya agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Drs Atan Tanjung selaku Sekretaris Desa pada hari Kamis 7 Februari beliau mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi Dana Desa selalu direncanakan dan melibatkan masyarakat untuk mengetahui tentang arah dan kemana berjalannya nanti mengenai anggaran Dana Desa direalisasikan. Sehingga masyarakat tidak lagi curiga dalam hal pelaksanaan Implementasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Bapak Ihyaul Wathon S,Sos. Selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Kamis 7 Februari 2019 beliau juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Dana Desa melibatkan keikutsertaan masyarakat guna untuk mengetahui semua proses pelaksanaan dan yang menjadi harapan utamanya kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu agar dapat terpenuhi nantinya semua keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Pasaribu selaku Tokoh pemuda masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Dana Desa ini yang beliau ketahui pemerintah Desa Kuala Bangka melibatkan masyarakat khusus bagi masyarakat yang kurang mampu agar semua keinginan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan nantinya tepat kepada sasaran nya. Dan juga pemerintahan Desa Kuala Bangka sangat mengutamakan kehadiran masyarakat dalam menjalankan pelaksanaan Implementasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sundari Juwita selaku masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Dana Desa sangat baik dikarenakan pemerintah Desa Kuala Bangka melibatkan kami selaku masyarakat jadi kami bisa mengetahui setiap pelaksanaan ini dan dengan dalam hal ini kami pun masyarakat bisa menyampaikan aspirasi bawa dalam pelaksanaan nanti mengutamakan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu.

4. Pendapatan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada tanggal 7 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa dalam pendapatan anggaran Dana Desa ini menghitung dari perhitungan Dana Desa melalui kategori status Desa yaitu berdasarkan jumlah produksi status Desa, letak geografis dan luas wilayah. Maka Desa Kuala Bangka 10 terbesar Dana Desa yang di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dan juga dalam hal ini disebabkan masyarakat yang aktif dalam pembayaran pajak lahan atau tanah.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs Atan Tanjung selaku Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, beliau juga mengatakan dalam pendapatan anggaran Dana Desa ini harus melihat dari beberapa kategori jumlah produksi, status Desa, letak geografis dan luas wilayah. Sebab secara geografis Desa Kuala Bangka terletak di wilayah pesisir yang mana masyarakat juga menggunakan getek atau panton dalam menyebrang yang mana getek atau panton ini bekerja sama dengan pemerintahan Desa Kuala Bangka yang

hasil operasiaonal nanti nya bagi rata dengan pihak masyarakat dan pemerintahan Desa Kuala Bangka.selaku

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ihyaul Wathon S,Sos. Selaku kepala urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Kamis tanggal 7 Februari, beliau mengatakan bahwa pendapatan anggaran Dana Desa ini melihat dari beberapa katergori baik dari jumlah produksi, status Desa, letak geografis dan luas wilayah sebab Desa Kuala Bangka ini menjadi 10 terbesar Dana Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Terlihat dari beberpa pendapata yang ada di Desa Kuala Bangka seperti pajak lahan dan juga biaya operasinal panton atau getek yang bekerjasama anatar pihak masyarakat dan juga pemeritahan Desa Kuala Bangka yang mana itu semua menjadi pendongkrak dalam bidang pendapatan Dana Desa di Kuala Bangka.

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sofyan Pasaribu selaku tokoh pemuda masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, beliau juga mengatakan bahwa yang beliau ketahui dalam pendapatan anggaran Dana Desa ini melihat dari beberapa status atau kategori dari jumlah produksi, status Desa, letak geografis dan luas wilayah. Dan juga hasil pendapatan anggaran Dana Desa ini semakin meningkat sebab pemerintahan Desa Kuala Bangka membangun jalan batu untuk ke lahan masyarakat sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk beraktifitas walaupun dalam keadan hujan.

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sundari Juwita selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019,

beliau juga mengatakan bahwa dalam hal ini yang beliau ketahui dalam pendapatan anggaran Dana Desa ini sangat memiliki potensi yang besar yang ada di Desa Kuala Bangka melihat dari segi perkebunan yang ada seperti lahan sawit, padi, getah dan juga saat ini yang menjadi pendapatan anggaran Dana Desa yaitu dari operasional penybrangan panton atau getek yang menghubungkan antara dua kecamatan yang hasilnya nanti bagi rata antara pihak masyarakat dan pemerintahan Desa Kuala Bangka.

4.1.5 Pemberdayaan Masyarakat

1. UMKM

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa dalam program UMKM ini pemerintahan Desa Kuala Bangka melakukan kegiatan seperti koperasi dan simpan pinjam uang dan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Ini dilakukan untuk meningkatkan atau menguatkan perekonomian masyarakat yang lemah dan dapat menesejahterakan masyarakat dengan adanya program UMKM tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs Atan Tanjung selaku Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 8 Februari 2019, beliau juga mengatakan bahwa dalam program UMKM ini hanya untuk tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka dengan sasaran masyarakat yang lemah, yang mana kegiatan seperti koperasi dan simpan pinjam uang. Sehingga nantinya

dapat membantu permasalahan ekonomi masyarakat dengan menggunakan dan memakai hasil produksi dari UMKM yang ada agar bisa tetap berjalan dan bertahap sehingga nantinya pendapatan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ihyaul Wathon S.Sos. selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 8 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa dalam program UMKM ini sangatlah memprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu, sebab UMKM ini meliputi kegiatan seperti koperasi simpan pinjam uang dengan tujuan untuk masyarakat yang kurang mampu boleh nanti menggunakan dengan aturan yang sudah ditentukan, dan masyarakat boleh menggunakan dan memakai hasil produksi dari UMKM yang telah di siapkan oleh pemerintah Desa Kuala Bangka. Dan program UMKM ini sangat mengutamakan bagi masyarakat yang kurang mampu secara perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan Pasribu selaku tokoh pemuda masyarakat di Desa Kuala Bangka pada tanggal 8 Februari 2019, beliau juga mengatakan bahwa memang program UMKM ini memprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan di adakan nya program seperti koperasi dan simpan pinjam uang kepada masyarakat serta dapat membantu perekonomian masyarakat yang lemah sehingga nanti nya mereka dapat mengembangkan usaha nya dari meminjam uang dari program UMKM sehingga ketika digunakan dengan baik maka perekonomian masyarakat yang lemah akan meningkat nanti nya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sundari Juwita selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya program UMKM ini sangatlah membantu bagi kalangan masyarakat yang lemah sebab mereka bisa melakukan usaha dengan melakukan peminjaman simpan pinjam uang atau koperasi sehingga mereka memiliki modal dan bisa untuk membuka usaha seperti berjualan. Dan juga merasa terbantu sebab dalam program UMKM ini sangat mengutamakan bagi masyarakat yang lemah ekonominya.

2. Pemanfaatan Lahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 8 Februari, beliau mengatakan bahwa pemanfaatan lahan ini sejak adanya penggunaan lahan oleh masyarakat yang mana nantinya disesuaikan dengan jenis tanaman dan juga dengan lokasi lahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Desa Kuala Bangka. Program pemberdayaan masyarakat di bidang pemanfaatan lahan ini melihat dari Desa Kuala Bangka memiliki kawasan lahan yang kosong yang sudah di alih fungsinya untuk beberapa lahan yang kosong, dan yang tidak memiliki kelengkapan surat, sehingga pemerintah Desa Kuala Bangka melakukan pemanfaatan lahan bagi masyarakat yang ingin menggunakan dengan bekerjasama dengan hasilnya nanti sebahagian diberikan kepada masyarakat Desa Kuala Bangka.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs Atan Tanjung selaku Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019. Beliau

juga menyampaikan bahwa dalam hal pemanfaatan lahan ini melihat dari jenis tanaman dan lokasi lahan. Yang mana pemanfaatan lahan ini dimiliki oleh pemerintah Desa Kuala Bangka yang mengambil alih lahan yang tidak memiliki kelengkapan surat sehingga pemerintah Desa Kuala Bangka melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan program pemanfaatan lahan yang mana masyarakat boleh menggunakan melihat dari status perekonomian yang lemah dan pemerintah Desa Kuala Bangka hanya menyiapkan lahan yang kosong dan sementara untuk lahan yang di isi nanti nya di siapkan oleh masyarakat yang ingin nanti nya menggunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ihyaul Wathon S,Sos. Selaku kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Jumat tanggal 8 Februari, beliau juga mengatakan pemanfaatan lahan ini sangat memfokuskan untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang menetap atau pun masyarakat yang lemah secara ekonomi. Dan mereka boleh menggunakan melihat dari jenis tanaman dan lahan yang kosong yang telah di siapkan oleh pemerintah Desa Kuala Bangka dan untuk jenis tanaman yang akan di isi disiapkan oleh pengguna lahan nanti nya, sebab pemerintah hanya menyiapkan lahan yang kosong dan hasilnya nanti sebahagian di berikan kepada pemerintahan Desa Kuala Bangka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan Pasaribu selaku tokoh pemuda masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, beliau juga mengetahui bahwa pemanfaatan lahan ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang menetap sehingga mereka dapat menggunakan pemanfaatan lahan ini dan memiliki

penghasilan yang bertambah tujuan dengan tujuan dengan adanya pemanfaatan lahan ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sundari Juwita selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari, beliau juga mengatakan sangat terbantu bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan bisa melakukan pemanfaatan lahan kepada pemerintahan Desa Kuala Bangka sehingga nantinya lahan yang dikelola dapat membantu atau mengatasi perekonomian masyarakat Desa Kuala Bangka yang lemah.

3. Berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 8 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa program-program yang telah dibuat pemerintah dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan seperti infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala Desa dan perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs Atan Tanjung selaku Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 8 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa program-program yang dibuat oleh pemerintah Desa dijalankan secara terus menerus karena prinsip dari pemberdayaan masyarakat adalah berkeanjutan sampai masyarakat benar-benar telah mandiri baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ihyaul Wathon S,Sos. selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa program-program yang telah dibuat oleh pemerintah dijalankan secara terus menerus dan berkesinambungan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahun nya, dan pelatihan keterampilan dari daur ulang sampah dan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sofyan Pasaribu selaku tokoh masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa program yang telah dibuat ada yang berkelanjutan dan ada yang berinovasi. Contoh yang berkelanjutan seperti program-program bidang kepemudaan setiap tahunnya pemuda di Desa Kuala Bangka dilatih untuk mengikuti kompetisi olahraga di tingkat Kecamatan sedangkan yang berinovasi seperti adanya keterampilan dari daur ulang sampah dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sundari Juwita selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa salah satu keinginan dari masyarakat adanya program pemberdayaan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

4.2 Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil yang telah di dapat peneliti di lokasi peneltian dengan adanya Tujuan dari anggaran Dana Desa yakni, untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Desa Kuala Bangka seperti jalan,jembatan,saluran irigasi, pembuatan parit beton, pembangunan kantor, dan untuk pemberdayaan masyarakatdan juga tujuan dari anggaran Dena Desa untuk mengurangi keluarga miskin yang ada di Desa Kuala Bangka. Artinya Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan juga pemberdayaan demi kemajuan desa Kuala Bangka. Dalam hal ini, fokus Pemerintahan Desa Kuala Bangka menggunakan dana ini untuk program Desa baik infrastruktur maupu pembangunan Sumber daya manusia.

Adapun sasaran dari anggaran Dana Desa adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa juga untuk Pemberdayaan masyarakat Desa dan juga untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Bangka yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa atau APBD Kabupaten/Kota labuhanbatu Utara. Anggaran Dana Desa digunakan untuk meliputi pembangunan jalan Desa, pembangunan parit,beton rehab bangunan kelas dan kantor juga untuk bidang pemberfayaan ekonomi masyarakat.

Program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka dari alokasi Dana Desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan dan gedung rehab PAUD, pembuatan parit beton, dan juga ada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan pendidikan pelatihan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kegiatan pberdayaan posyandu,

kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok pemuda, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.. Setelah itu, adanya program unggulan yang saat ini menjadi prioritas Desa antara lain pemasangan jaringan internet ke masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi . Sejang ini ada program-program yang telah ditawarkan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat tetapi program tersebut hanya bersifat pembangunan saja, sementara masyarakat butuh untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan dari Implementasi Dana Desa melalui musyawarah desa dan dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat untuk menampungnya tenaga kerja yang bersifat padat karya, dan sangat mengutamakan peran dan keikutsertaan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan juga Pemerintahan Desa Kuala Bangka melakukan pelaksanaan ini secara terbuka agar masyarakat mengetahui dalam pelaksanaan implementasi Dana Desa dan tujuannya agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama.

Perhitungan Dana Desa melalui kategori status desa yaitu berdasarkan jumlah penduduk, status desa, letak geografis dan luas wilayahnya. Maka Desa Kuala Bangka 10 besar Dana Desa yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara. Dan dengan meningkatnya pendapatan anggaran Dana Desa sehingga mampu untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat disebabkan pemerintahan Desa Kuala Bangka telah menyiapkan beberapa alat dan fasilitas untuk para petani dan juga nelayan sehingga mereka merasa lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pemerintahan Desa Kuala Bangka sangat fokus ke pada program UMKM yang mana pemerintahan Desa Kuala Bangka melakukan kegiatan seperti koperasi dan simpan pinjam uang dan kegiatan pokok di bidang permodalan di antara nya memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Yang mana masyarakat boleh untuk menggunakan untuk menjadikan modal dalam berusaha sehingga nanti dapat membuat mereka sejahtera. Program UMKM ini sudah berjalan pada tahun 2015 yang mana masyarakat berkeinginan untuk berwirausaha semakin membesar. Sejumlah program pemberdayaan dan pelatihan terkait usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang di gelar berbagai pihak sangat diminati oleh warga. Sehingga dengan adanya UMKM ini dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka.

Awalnya Pemerintahan Desa Kuala Bangka melihat dari segi aspek ekonomi masyarakat rendah. Sehingga pemerintahan Desa Kuala Bangka memberikan program pemanfaatan lahan yang mana dalam penggunaan lahan untuk masyarakat disesuaikan dengan jenis tanaman sesuai dengan lokasi lahan. Kemudian pemerintahan Desa Kuala Bangka hanya menyediakan lahan kosong kepada masyarakat tersebut, lalu lahan yang diberikan oleh pemerintahan Desa Kuala Bangka dijadikan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Kemudian apabila ada masyarakat yang tidak memanfaatkan lahan yang diberikan pemerintahan Desa Kuala Bangka maka lahan tersebut akan di ambil alih lagi oleh pemerintah Desa Kuala Bangka tersebut, hal ini dilakukan agar para masyarakat yang menerima lahan dari pemerintah tersebut lebih memanfaatkan lahan yang

diberikan oleh pemerintah tersebut. Dengan adanya program pemanfaatan lahan ini dapat membuat kehidupan masyarakat yang ekonominya rendah menjadi lebih sejahtera

Program-program yang telah dibuat oleh pemerintah dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu tiap tahun nya, dan pelatihan keterampilan kepala desa dan perangkat desa. Program-program tersebut dijalankan secara terus menerus karena prinsip dari pemberdayaan masyarakat adalah berkelanjutan sampai masyarakat benar-benar telah mandiri dari aspek sosial maupun ekonomi.

Adapun program yang telah dibuat oleh pemerintah dijalankan dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala desa dan perangkat desa. Program yang telah dibuat dan berkelanjutan dan ada yang berinovasi. Contoh yang berkelanjutan seperti program-program bidang kepemudaan setiap tahunnya pemuda di Desa Kuala Bangka dilatih dan mengikuti kompetisi olahraga di tingkat Kecamatan sedangkan yang berinovasi seperti adanya keterampilan dari daur ulang sampah dan lain sebagainya. Hal tersebut tak terlepas dari keinginan masyarakat adanya program pemberdayaan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan secara terus menerus serta berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan dan sasaran mulai dari penggunaan anggaran sampai turunnya dana yang langsung melibatkan kantor Desa dan masyarakat
2. Adanya program yang sudah berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada dan program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka dari alokasi Dana Desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan dan rehab Gedung PAUD, pembuatan parit beton dan juga ada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Pendidikan pelatihan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kegiatan pemberdayaan Posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.
3. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur antara pemerintah Desa dan masyarakat sudah berjalan sehingga program-program tersebut dapat berjalan. Di lihat dari banyaknya pembangunan sarana dan prasarana Desa seperti kantor, sekolah dan bantuan modal usaha dan juga hewan ternak kepada masyarakat maka sejauh ini program-program tersebut sudah berjalan dengan baik.

4. Adapun hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka ialah keterlambatan turunya dana dari pemerintahan pusat sehingga program-program yang telah ditetapkan mengalami keterlambatan dalam realisasinya. Disamping itu, adapun hambatan lain ialah adanya kesibukan aktivitas masyarakat Desa yang menyebabkan kurang antusiasnya keikutsertaan masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
5. Adanya proses dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur sudah disosialisasikan dan melibatkan lapisan masyarakat, hal tersebut, adalah cerminan partisipasi masyarakat.
6. Setiap program yang dijalankan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui tahap penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk program-program pemberdayaan dan pembangunan yang berumber dari Anggaran Dana Desa.
7. Program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa di Implementasikan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya dan, Pendidikan/pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat jangan mempersulit masyarakat ketika ingin mengurus perizinan yang berkaitan dengan perizinan kepemilikan tanah dan menyapu bersih oknum-oknum yang terlibat pungutan liar (pungli).
2. Diharapkan setiap program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa hendaknya dilakukan evaluasi yang mendalam agar program yang telah terlaksana efektif dan efisien.
3. Diharapkan Pemerintah Desa Transparansi dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bila perlu di setiap dusun dibuat papan informasi berkaitan dengan penggunaan Anggaran Dana Desa.
4. Diharapkan Pemerintah Desa Kuala Bangka harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan Anggaran Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Agustino Leo, 2016. *Dasar Dasar Kehijakan Publik*, Affabeta : Bandung.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : graha ilmu
- Anggara, Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia : Bandung.
- Deliarnov.(2009). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo
- Jusman, La Ode.2016. *Studi implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Membangun Pedesaan (Studi Kasus Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi*. Skripsi Universitas Halu Oleo).
- Makawimbang Ferry, 2016. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa*. Libri: Jakarta
- Mardikanto, soebioto, 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Mardikantodkk, 2015 *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta : Bandung
- Moleong. J. Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya : Bandung
- Nugroho, Riant 2004: *Kebijakan Publ: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nurdin, Usman 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010, *sosiologi pemerintahan dari pesepektif pelayanan*, Penerbit Citra utama : Jakarta.
- Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber Perundang-undangan :

Lembaran Negara Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan dan
Pembagian Tugas Perangkat Desa

DAFTAR WAWANCARA

Judul Penelitian : Implementasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Nama Peneliti : Mar`ie Muhammad Tanjung

Prodi/Fakultas : Ilmu Kesejahteraan Sosial/Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara.

Nama Informan :

Waktu Wawancara :

1. Identitas Informan :

- a. Jenis Kelamin :
- b. Agama :
- c. Usia :
- d. Pendidikan :
- e. Pekerjaan :

2. Daftar Pertanyaan

a. Pertanyaan diajukan untuk Kepala Desa Kuala Bangka

- 1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Apakah tujuan dari Implementasi Anggaran Dana Desa di Desa Kuala Bangka tersebut?
 - b. Apakah tujuan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau hanya Kebijakan Pemerintah Desa?
 - c. Apakah yang menjadi sasaran anggaran Dana Desa tersebut?
- 2. Program Kegiatan
 - a. Program-program apa saja yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka tersebut?

- b. Apakah ada program unggulan atau rancangan kedepan yang akan diterapkan dalam mengalokasikan Dana Desa di Desa Kuala Bangka?
3. Pelaksanaan
 - a. Bagaimana sistem dalam Pelaksanaan Implementasi Anggaran Dana Desa di Kuala Bangka tersebut?
 - b. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Anggaran Dana Desa di Kuala Bangka berjalan sesuai prosedur?
4. Pendapatan Anggaran Dana Desa
 - a. Berapakah Pendapatan Anggaran Dana Desa setiap tahun nya di Desa Kuala Bangka tersebut?
 - b. Berapakah Angka tertinggi Pendapatan Anggaran Dana Desa yang pernah di peroleh Desa Kuala Bangka?
5. UMKM
 - a. Bagaimana meningkatkan program UMKM ini agar di minati banyak Masyarakat Desa kuala Bangka tersebut?
 - b. Apakah dengan adanya UMKM ini dapat mengurangi kemiskinan di Desa Kuala Bangka tersebut?
 - c. Seperti apa program UMKM yang saat ini dijalankan Pemerintah Desa Kuala Bangka tersebut?
6. Pemanfaatan Lahan
 - a. Bagaimana sistem penggunaan Pemanfaatan lahan ketika Masyarakat Desa Kuala Bangka ingin menggunakan?
 - b. Berapa luas dan lebar Pemanfaatan lahan yang di sediakan Pemerintah Desa Kuala Bangka untuk Masyarakat Kuala Bangka?
7. Berkelanjutan
 - a. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dijalnkan secara terus-menerus dan berkelanjutan?
 - b. Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program prioritas Dana Desa,apakah Pemerintah Desa Kuala Bangka berhasil menerapkan program-program Pemberdayaan tersebut?

b. Pertanyaan diajukan untuk Sekretaris Desa Kuala Bangka

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Apakah tujuan dari implementasi anggaran Dana Desa di Desa Kuala Bangka tersebut?
 - b. Apakah tujuan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau hanya Kebijakan Pemerintah Desa?
 - c. Apakah yang menjadi sasaran Anggaran Dana Desa tersebut?
2. Program Kegiatan
 - a. Program apa saja yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka hingga saat ini?
 - b. Apakah ada program unggulan atau rancangan kedepan yang akan diterapkan dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa di Desa Kuala Bangka?
3. Pelaksanaan
 - a. Apakah dalam Pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa di ketahui oleh Masyarakat Desa Kuala Bangka?
 - b. Bagaimana sistem Pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa Kuala Bangka?
4. Pendapatan Anggaran Dana Desa
 - a. Apakah dari hasil lahan Masyarakat termasuk dari Pendapatan anggaran Dana Desa Kuala Bangka?
 - b. Apakah Pendapatan Anggaran Dana Desa boleh untuk diketahui oleh Masyarakat?
5. UMKM
 - a. Apakah ada program selain dari UMKM yang saat ini dijalankan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka?
 - b. Berapakah modal yang diterima dari program UMKM Desa Kuala Bangka tersebut?
6. Pemanfaatan Lahan
 - a. Bagaimana cara yang dilakukan untuk dapat menggunakan Pemanfaatan lahan ini?

- b. Bagaimana sistem dalam pembagian hasil dari Pemanfaatan Lahan ini?

7. Berkelanjutan

- a. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan?
- b. Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program prioritas alokasi Dana Desa, dan apakah Pemerintah Desa Kuala Bangka berhasil menerapkan program-program pemberdayaan tersebut?

c. Pertanyaan diajukan untuk Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Kuala Bangka

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Apakah tujuan dari implementasi anggaran Dana Desa di Desa Kuala Bangka tersebut?
- b. Apa alasan Pemerintah Desa Kuala Bangka mengalokasikan Anggaran Dana Desa hanya fokus pada bidang pembangunan sementara dalam Permendagri No .37 Tahun 2007, ADD juga digunakan untuk untuk bidang pemberdayaan masyarakat?

2. Program Kegiatan

- a. Program-program apa saja yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka hingga saat ini?
- b. Apakah ada program unggulan atau rancangan kedepan yang akan diterapkan dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa di Desa Kuala Bangka?

3. Pelaksanaan

- a. Bagaimana bentuk pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa yang saat ini berjalan di Desa Kuala Bangka?
- b. Apakah dalam Pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa memerlukan masyarakat?

4. Pendapatan Anggaran Dana Desa

- a. Bagaimana cara menghitung Pendapatan anggaran Dana Desa di Desa Kuala Bangka tersebut?

b. Apakah Pendapatan anggaran Dana Desa sangat berpengaruh terhadap kebun yang dimiliki oleh masyarakat?

5. UMKM

a. Apa yang menjadi peran penting masyarakat dalam program UMKM yang saat ini sedang berjalan?

b. Kendala apa saja yang sering ditemui dalam UMKM yang dilakukan tersebut?

6. Pemanfaatan Lahan

a. Sejak kapan program Pemanfaatan Lahan ini di sosialisasikan di masyarakat?

b. Apakah dalam Pemanfaatan Lahan ini tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

7. Berkelanjutan

a. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dijadikan secara terus-menerus dan berkelanjutan?

b. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program prioritas alokasi anggaran Dana Desa, apakah Pemerintah Desa Kuala Bangka berhasil untuk menerapkan program-program pemberdayaan tersebut?

d. Pertanyaan diajukan kepada Masyarakat Desa Kuala Bangka

1. Tujuan dan Sasaran

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Bangka?

b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dan sasaran dari implementasi anggaran Dana Desa tersebut?

2. Program Kegiatan

a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu program-program Dana Desa yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka, apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat?

b. Program-program yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

3. Pelaksanaan
 - a. Menurut Bapak/Ibu apakah Pelaksanaan Implementasi anggaran Dana Desa sudah berjalan dengan baik?
 - b. Adakah dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan Pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa tersebut?
4. Pendapatan Anggaran Dana Desa
 - a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Pendapatan anggaran Dana Desa ini setiap tahun nya?
 - b. Apakah Pendapatan anggaran Dana Desa pernah di publikasikan kepada masyarakat?
5. UMKM
 - a. Apakah Pemerintah Desa Kuala Bangka mensosialisasikan adanya program UMKM tersebut?
 - b. Ketika Pemerintah Desa Kuala Bangka mensosialisasikan program, Apakah melibatkan seluruh masyarakat atau hanya beberapa perwakilan kepala dusun dan kepala keluarga?
6. Pemanfaatan Lahan
 - a. Apakah dengan adanya Pemanfaatan Lahan Bapak/Ibu merasa terbantu dalam perekonomian?
 - b. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya program Pemanfaatan lahan tersebut?
7. Berkelanjutan
 - a. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka Kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan?
 - b. Apakah program yang saat sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)**

Nama : Mar'ie Muhammad Tanjung
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Bangka, 17 Oktober 1996
Nomor Hp : 082304559314
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
E-Mail : mariemuhammadtanjung@gmail.com
Hobi : Futsal, Sepak Bola
Alamat : Jalan Pendidikan DEsa Kuala Bangka
Pendidikan Formal :

1. Tahun 2003 – 2009 SD N 112275 Kuala Bangka
2. Tahun 2009 – 2012 MTs. Swasta Kuala Bangka
3. Tahun 2012 – 2015 Madsrah Aliyah Kisaran

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya

Mar'ie Muhammad Tanjung